



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Achmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK - 78124



RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2022

BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI-----	i
DAFTAR TABEL-----	ii
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2019-----	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian RENSTRA Biro Perekonomian	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian	37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Biro Perekonomian	50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD -----	58
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian.....	59
3.3 Program dan Kegiatan	76
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH -----	78
BAB V. PENUTUP -----	82



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Pencapaian Renstra Biro Perekonomian Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Barat.....	18
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	38
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	52
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	60
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat	69



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Tahun ketiga Rencana Strategis Biro Perekonomian Tahun 2018-2023. Sistem perencanaan pembangunan Biro Perekonomian merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5), yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Ketiga peraturan



perundang-undangan dimaksud mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 16) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 17) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023;
- 18) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 19) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Biro Perekonomian ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Biro Perekonomian Tahun 2022 yaitu;

- a. Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan serta energi dan sumberdaya mineral;
- b. Meningkatkan Pengembangan Kebijakan di bidang sarana perekonomian daerah termasuk ekonomi kreatif;



- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan administrasi perkantoran;
- d. Meningkatkan Penilaian Kinerja Instansi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perekonomian Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Tahun 2022 mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Biro Perekonomian
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Biro Perekonomian
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA BIRO PEREKONOMIAN

Evaluasi pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 2.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD;

3. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Program ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Biro Perekonomian Setda Prov.Kalbar. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :



3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat terlaksanannya sistem Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik di Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain:

- 4.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 4.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat terlaksanannya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain:

- 5.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat terlaksanannya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain:

- 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 6.2. Pemeliharaan Mebel.
- 6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.

Program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan, yaitu :

- 7.1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan



Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Kalimantan Barat.

7.2. Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Inflasi Daerah. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Kalimantan Barat.

7.3. Penyusunan Analisis Makro Perekonomian Kalimantan Barat;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Penyusunan Analisis Makro Perekonomian Kalimantan Barat. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Analisis Makro Perekonomian Kalimantan Barat. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Analisis Makro Perekonomian Kalimantan Barat.

7.4. Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat.

7.5. Fasilitasi Bahan Rumusan Pengelolaan Kebijakan Bidang Infrastruktur;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Fasilitasi Bahan Rumusan Pengelolaan Kebijakan Bidang Infrastruktur. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi Bahan Rumusan Pengelolaan Kebijakan Bidang Infrastruktur. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rumusan Pengelolaan Kebijakan Bidang Infrastruktur.

7.6. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan di Bidang Koperasi UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat;



Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan di Bidang Koperasi UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Kebijakan di Bidang Koperasi UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan di Bidang Koperasi UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat.

7.7. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan di Kalimantan Barat;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan di Kalimantan Barat. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan di Kalimantan Barat. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan di Kalimantan Barat.

7.8. Fasilitas Kebijakan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Fasilitas Kebijakan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Fasilitas Kebijakan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat.

8. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.

Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu :

8.1. Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian.



- 8.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- 8.3. Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat.
- 8.4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan.
- 8.5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan.
- 8.6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan. Output kegiatan adalah



Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan.

8.7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Air;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Air. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Air. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Air.

9. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Program ini terdiri dari 5 (Lima) kegiatan, yaitu :

9.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

9.2. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar.



- 9.3. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi.
- 9.4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersedianya Bahan Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- 9.5. Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah. Output kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Tersusunnya dokumen Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian
Pencapaian Renstra Biro Perekonomian Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1.20.03.10	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat)									
1.20.1.20.03.05.24	Program Bina Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumberdaya Mineral	Terselenggaranya Layanan Kebijakan Pembinaan Kegiatan Perekonomian Daerah								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.03.05.24.01	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat			91,31%						
1.20.1.20.03.05.24.02	Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Usaha Dalam Kawasan Hutan Kalimantan Barat			84,84%						
1.20.1.20.03.05.24.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penyusunan Kuota)			91,89%						
1.20.1.20.03.05.24.04	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan			80,56%						
1.20.1.20.03.05.24.05	Penyusunan Perumusan Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat			86,69%						



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.03.05.24.06	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat (HPS Nas, HPS Prov, Gelar Pangan Nas, Monev Pelaksanaan Kebijakan)			68,26%						
1.20.1.20.03.05.24.07	Penyusunan Perumusan Kebijakan Makro Bidang Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat			92,42%						
1.20.1.20.03.05.24.08	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat			78,91%						
1.20.1.20.03.05.24.12	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat			76,60%						
1.20.1.20.03.05.24.13	Evaluasi Pelaksanaan energi Kalimantan Barat			64,39%						



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.03.05.24.14	Kajian Kebijakan Potensi Pertanian di Daerah Perbatasan			96,59%						
1.20.1.20.03.05.24.16	Penyusunan Perumusan Kebijakan Makro Pengembangan Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura			60,23%						
1.20.1.20.03.05.30	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	Terselenggaranya Layanan Kebijakan Pembinaan Sarana Perekonomian Daerah								
1.20.1.20.03.05.30.01	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan			84,32%						
1.20.1.20.03.05.30.04	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2017 dan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018			83,3						



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.03.05.30.05	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Sanimas, Pamsimas dan PPSP)			68,84%						
1.20.1.20.03.05.30.08	Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Capacity Building BUMD			89,67%						
1.20.1.20.03.05.30.09	Monitoring Penyertaan Modal BUMD			39,36%						
1.20.1.20.03.05.30.10	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID, Rakor TPID)			93,47%						
1.20.1.20.03.05.30.12	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat			95,34%						



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.03.05.30.14	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata Kalimantan Barat			80,75%						
1.20.1.20.03.05.30.15	Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat			87,85						
1.20.1.20.03.05.30.16	Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan Jasa Kontruksi Kalimantan Barat			87,01%						
1.20.1.20.03.05.30.17	Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Perhubungan Kalimantan Barat			72,65%						
3.00.3.00.00.06.15	Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.3.00.00.06.15.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebunan				123.407.500	95.647.600	75,88%			
3.00.3.00.00.06.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura				44.073.000	39.871.600	90,47%			
3.00.3.00.00.06.15.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				35.820.000	19.470.000	54,36%			
3.00.3.00.00.06.15.05	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan				70.453.200	63.247.000	89,77%			
3.00.3.00.00.06.15.07	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat				46.871.450	38.988.000	83,18%			



*Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2022*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.3.00.00.06.15.08	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat				27.683.000	16.744.000	60,48%			
3.00.3.00.00.06.15.09	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup				69.695.000	63.082.000	90,51%			
3.00.3.00.00.06.15.10	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan				76.550.000	46.280.000	60,33%			
3.00.3.00.00.06.15.11	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan				58.380.000	47.260.000	80,95%			
3.00.3.00.00.06.15.12	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral				96.267.000	61.749.000	64,14%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.3.00.00.06.15.13	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan				107.079.550	78.282.600	73,11%			
3.00.3.00.00.06.16	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah									
3.00.3.00.00.06.16.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				19.890.000	5.690.000	28,61%			
3.00.3.00.00.06.16.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum				29.230.000	19.448.904	66,54%			
3.00.3.00.00.06.16.03	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat				35.300.000	32.172.600	91,14%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.3.00.00.06.16.04	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat				59.981.800	26.583.600	44,32%			
3.00.3.00.00.06.16.05	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM dan Pariwisata				36.833.000	21.273.800	57,76%			
3.00.3.00.00.06.16.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan				54.094.000	15.154.000	28,01%			
3.00.3.00.00.06.16.07	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah				84.428.000	44.300.800	52,47%			
3.00.3.00.00.06.16.08	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal				32.375.000	20.852.900	64,41%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.3.00.00.06.16.09	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat				58.060.000	38.395.400	66,13%			
3.00.3.00.00.06.16.10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha				66.460.000	61.070.000	91,89%			
5.01.5.01.01.08.15	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD									
5.01.5.01.01.08.16.01	Sinkronisasi Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat							0	0	0,00%
5.01.5.01.01.08.16.02	Monitoring dan Evaluasi BUMD di Provinsi Kalimantan Barat							44.162.800	44.162.800	100,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.03	Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat							38.775.200	24.577.600	63,38%
5.01.5.01.01.08.16.04	Penyusunan PERDA Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat							19.910.000	19.910.000	100,00%
5.01.5.01.01.08.16.05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi Kalimantan Barat							21.876.500	21.876.500	100,00%
5.01.5.01.01.08.16.06	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan layanan umum daerah							26.176.500	26.056.500	99,54%
5.01.5.01.01.08.16	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Serta Ketahanan Pangan.									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat							5.349.800	4.849.800	90,65%
5.01.5.01.01.08.16.02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat							64.383.900	63.628.900	98,83%
5.01.5.01.01.08.16.03	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat							4.594.000	4.094.000	89,12%
5.01.5.01.01.08.16.04	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat							5.204.700	5.204.700	100,00%
5.01.5.01.01.08.16.05	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat							11.148.600	11.148.600	100,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat							5.417.600	4.417.600	81,54%
5.01.5.01.01.08.16.07	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat							10.965.900	5.215.900	47,56%
5.01.5.01.01.08.16.08	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat							12.822.300	5.822.300	45,41%
5.01.5.01.01.08.16.09	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat							19.065.900	18.165.900	95,28%
5.01.5.01.01.08.16.10	Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat							12.239.200	12.239.200	100,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat							20.265.400	18.515.400	91,36%
5.01.5.01.01.08.16.12	Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat							0	0	0,00%
5.01.5.01.01.08.16.13	Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat							22.269.800	20.319.800	91,24%
5.01.5.01.01.08.16.14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat							11.577.000	9.277.000	80,13%
5.01.5.01.01.08.16.15	Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan							14.428.900	11.928.900	82,67%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.16	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat							15.434.500	13.184.500	85,42%
5.01.5.01.01.08.16.17	Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat							27.085.300	22.513.900	83,12%
5.01.5.01.01.08.16.18	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat							12.344.000	9.094.000	73,67%
5.01.5.01.01.08.16.19	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat							33.033.600	21.333.600	64,58%
5.01.5.01.01.08.16.20	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat							23.993.400	10.043.400	41,86%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.21	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat							0	0	0,00%
5.01.5.01.01.08.17	Program Bina Sarana Perekonomian									
5.01.5.01.01.08.01	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum)							15.117.200	3.027.200	20,02%
5.01.5.01.01.08.02	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum							28.739.600	26.689.600	92,87%
5.01.5.01.01.08.03	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat							26.057.000	25.982.000	99,71%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.04	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat							10.704.700	10.704.700	100,00%
5.01.5.01.01.08.05	Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat							33.231.100	32.156.100	96,77%
5.01.5.01.01.08.06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif							10.824.300	10.824.300	100,00%
5.01.5.01.01.08.07	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat							55.957.600	55.157.600	98,57%
5.01.5.01.01.08.18	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.18.01	Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat							42.221.400	38.671.400	91,59%
5.01.5.01.01.08.18.02	Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat							6.604.300	6.604.300	100,00%
5.01.5.01.01.08.18.03	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat							32.641.400	32.391.400	99,23%
5.01.5.01.01.08.18.04	Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat							69.719.500	63.569.500	91,18%
5.01.5.01.01.08.18.05	Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat							48.774.000	41.274.000	84,62%



2.2. ANALISIS PELAYANAN KINERJA BIRO PEREKONOMIAN

Analisis kinerja pelayanan Biro Perekonomian berdasarkan hasil kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terselenggaranya Layanan Kebijakan Pembinaan Kegiatan Perekonomian Daerah Yang Baik			1 Pergub, 7 Kep Gub, 35 Rekomendasi	13 Rekomendasi				1 Pergub, 6 Kep Gub, 17 Rekomendasi	13 Rekomendasi					
2	Terselenggaranya Layanan Kebijakan Pembinaan Sarana Perekonomian Daerah			2 Raperda, 10 Rekomendasi	1 Rapaerda, 10 Rekomendasi				17 Rekomendasi	1 Rapaerda, 10 Rekomendasi					
3	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi					1 Perda, 3 Rekomendasi					3 Rekomendasi	1 Perda, 3 Rekomendasi			
4	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup					22 Rekomendasi					22 Rekomendasi	22 Rekomendasi			
5	Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha					7 Rekomendasi					7 Rekomendasi	7 Rekomendasi			



*Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2022*

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian					5 Rekomendasi					5 Rekomendasi	5 Rekomendasi			
7	Tersedianya Bahan Rumusan Kebijakan Perekonomian						7 Dokumen	7 Dokumen					7 Dokumen	7 Dokumen	
8	Tersedianya Bahan Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam						8 Dokumen	8 Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen	
9	Tersedianya bahan rumusan kebijakan BUMD dan BLUD						1 Perda, 1 Pegub, 8 Dokumen	9 Dokumen					1 Perda, 1 Pegub, 8 Dokumen	9 Dokumen	



Program yang mendukung sasaran ini adalah Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan Pembangunan Daerah, antara lain :

A. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.

Kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah;
2. Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Penyusunan Analisis Makro Perekonomian Kalimantan Barat;
4. Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat;
5. Fasilitasi Bahan Rumusan Pengelolaan Kebijakan Bidang Infrastruktur;
6. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan di Bidang Koperasi UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat;
7. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan di Kalimantan Barat;
8. Fasilitasi Kebijakan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat;

B. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.

Kegiatan :

1. Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian;
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat;
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan;
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan;
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan;
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Air;

C. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;



2. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar;
3. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah;

2.3. ISU-ISU PENTING PEYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO PEREKONOMIAN.

Dalam kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintah yang diselenggarakan, bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dengan fungsinya penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan Perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian maka Biro Perekonomian memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan daerah di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah.

Dalam pembangunan daerah, sumber daya alam berperan penting sebagai penyedia bahan baku bagi sektor produksi untuk pembangunan ekonomi dan sebagai pendukung sistem kehidupan. Untuk itu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional, efisien, bijaksana dan berkelanjutan agar pembangunan dan kehidupan masyarakat dapat hidup berlanjut.

Ada beberapa hal terkait masalah/kendala pada pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Perekonomian, antara lain sebagai berikut :

1. Bagian BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah
 - Rencana Bisnis dan RKAP Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalbar : Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan



Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD dan Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis. Sampai dengan akhir tahun 2020, Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalbar belum mempunyai Rencana Bisnis dan RKAP;

- Modal Dasar Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalbar : Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Modal Dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Sampai dengan tahun 2018, jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Perusahaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah mencapai 99,82% atau sebesar Rp. 49.912.130.204,-. Hal tersebut akan menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat apabila akan melakukan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
- Peningkatan Deviden BUMD Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) : PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Kalimantan Barat mempunyai peluang yang besar dalam upaya meningkatkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) melalui Penjaminan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa (Program Surety Bond) yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Berdasarkan data Pengadaan Barang dan Jasa se-Kalimantan Barat pada tahun 2020, dari jumlah sebesar ± Rp 6,2 triliun, total nilai proyek pengadaan barang dan jasa yang dijamin oleh PT Jamkrida Kalbar pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 303.639.576.980,- dengan rincian Plafond Penjaminan sebesar Rp 15.181.978.849,-;
- Bentuk Hukum Perusahaan Daerah : Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Biro Perekonomian menginisiasi



penyusunan Peraturan Daerah untuk mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalbar menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalbar;

- Selama masa pandemi covid-19 kesulitan dalam melaksanakan kegiatan yang dikarenakan beberapa Kabupaten / Kota angka terinfeksi covid-19 masih ada;
- Mewabahnya Pandemi Covid 19 dan dokumen Kelengkapan BLUD Kab/Kota yang masih berupa Hardcopy sehingga mengharuskan pertemuan tatap muka.

2. Bidang Sumber Daya Alam

- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;



- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan



Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;

- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optima;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber



Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan;

- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemangkasan Anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat yang tidak dapat dilaksanakan.

3. Bidang Sarana Perekonomian Daerah

- Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan FGD bidang infrastruktur tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
- Kegiatan ini diusulkan untuk pemotongan tahap kedua tetapi ketika terbit DPPA ternyata anggaran ini tidak dipotong;
- Kebijakan bidang perhubungan, kominfo dan pekerjaan umum belum terinventarisir secara optimal sehingga belum mendapatkan pola secara sistematis yang dapat mendorong sebuah kebijakan yang sinergis dalam meningkatkan perekonomian;



- Adanya pandemi covid-19 diperlukan rasionalisasi anggaran sehingga perlu menyesuaikan belanja barang modal sebesar 35% yang berdampak pada capaian kinerja program;
- Sektor perhubungan terkait kebijakan ODOL (Over Dimensi dan Over Load), harusnya perhubungan yang melakukan razia dan pengawasan sementara kewenangan melakukan razia dan pengawasan jembatan timbang ada di pusat;
- Sektor perhubungan terkait kebijakan ODOL (Over Dimensi dan Over Load), harusnya perhubungan yang melakukan razia dan pengawasan sementara kewenangan melakukan razia dan pengawasan jembatan timbang ada di pusat;
- Belum sinkronnya data Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif yang dapat dijadikan tolak ukur untuk percepatan pembangunan dalam mendorong kemajuan perekonomian Kalbar;
- Pandemi Covid 19 berdampak sangat luas bagi perekonomian khususnya pelaku UMKM;
- Timbulnya berbagai permasalahan sosial disekitar kawasan industri baru;
- Ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting dapat dipenuhi dari produksi lokal.;
- Kebijakan mendukung pengembangan industri dan penciptaan iklim kondusif belum tercipta secara optimal;
- Belum optimalnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota bersama stakeholder dalam pengendalian inflasi;
- Belum optimalnya review berkala neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok yang mendorong data informasi pangan dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan pasokan;
- Belum optimalnya rantai pasokan lokal dan produktivitas serta akses pasar;
- Masih bergantungnya pasokan komoditas penyumbang inflasi seperti cabe rawit dan bawang merah dari luar Kalbar serta belum optimalnya integritas kegiatan pengendalian;



- Rasionalisasi APBD 2020 untuk mitigasi dampak multisektor covid-19;
- Belum terbentuknya tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;
- Tahun 2020 targetnya ada 5 Kabupaten/Kota tetapi yang terealisasi hanya 2 TPAKD terbentuk yaitu Kota Pontianak dan Kab. Sanggau;

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah serta terhadap capaian Program Nasional. Masih adanya Program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat target indikator berdampak pada kurang optimalnya sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Perekonomian di masa yang akan datang dihadapi Biro Perekonomian dalam jangka waktu 5 Tahun mendatang adalah:

Tantangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengembangan pelayanan, Yaitu:

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur yang professional di bidangnya;
2. Belum Optimalnya Sistem Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana berbasis teknologi informasi dalam rangka E-Government Bidang Perekonomian;
4. Kurangnya pemahaman para perencana mengenai Bidang Perekonomian.

Peluang yang dihadapi, yaitu:

- a. Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perekonomian;
- c. Adanya Pelayanan Kebijakan Satu Data;
- d. Adanya Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, Antar Kawasan dan Bilateral di Bidang Perekonomian.



Isu strategis Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalimantan Barat diperoleh dari analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra kementerian Koordinator Bidang perekonomian, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Isu Strategis Biro Perekonomian yaitu;

- a. Masih Rendahnay *Capacity Bilding* sumber daya apratur di bidang perekonomian daerah;
- b. Masih terdapatnya inkonsistensi data dan informasi di bidnag perekonomian daerah;
- c. Perencanaan Program dan Kegiatan di bidang Perekonomian daerah belum mampu menjawab permasalahan ekonomi makro daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL BIRO PEREKONOMIAN

Hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan program dan kegiatan didalam Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2020, terdapat penekanan pada 4 (Empat) aspek yaitu :

- 1) Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari persentase keseluruhan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran (Indikator Kinerja Utama/IKU) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebesar 100 %
- 2) Akuntabilitas Keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat realisasi fisik keuangannya sebesar 90,73 % dan interval nilai atau rentang capaian nilai 75 - 90 dengan kategori capaian BAIK.
- 3) Capaian kinerja realisasi fisik keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian kinerja sasaran strategis atau capaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Hasil Capaian Kinerja Sasaran atau Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi faktor sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasana, leadership Pimpinan serta hubungan jalinan kerjasama antar Bagian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Kunci keberhasilan adalah



Komitmen dan Kemauan dari seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	26.607.522	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	21.567.400	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Perekonomian	RKA dan DPA Biro Perekonomian Prov. Kalbar	1 Dokumen	12.516.268	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Perekonomian	RKA dan DPA Biro Perekonomian Prov. Kalbar	1 Dokumen	11.038.500	
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Perekonomian	LAKIP LPPD LKPJ dan TAPKIN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	19.126.459	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Perekonomian	LAKIP	1 Dokumen	15.766.200	
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	LPPD dan LKPJ Monev TAPKIN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	57.243.653	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	LPPD dan LKPJ Monev TAPKIN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	47.283.600	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Biro Perekonomian	Gaji PTT Laporan Keuangan	2 Orang 1 Dokumen	93.219.309	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Biro Perekonomian	Gaji PTT Laporan Keuangan	2 Orang 1 Dokumen	87.819.220	



No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Perekonomian	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8.363.878	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Perekonomian	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9.803.600	
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Perekonomian	Pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan	2 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Perekonomian	Pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0	
4 01 01 1.06	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah					Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah					
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Perekonomian	Hand Sanitizer Masker Penutup Tangan	25 Liter 150 Kotak 4 Kotak	19.750.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Perekonomian	Hand Sanitizer Masker Penutup Tangan	25 Liter 150 Kotak 4 Kotak	19.750.000	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Perekonomian	Barang Cetak dan Pengadaan Materai 6000 Materai 3000	5000 Lembar 400 Lembar 600 Lembar	13.199.650	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Perekonomian	Barang Cetak dan Pengadaan Materai 10.000	60 Buku 4638 Lembar 100 Lembar	13.199.400	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Perekonomian	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30 Dokumen Laporan	235.807.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Perekonomian	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	33 Dokumen Laporan	102.078.196	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					



No. Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Perekonomian	Dokumen PPID	1 Laporan	41.947.843	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Perekonomian	Dokumen PPID	1 Laporan	33.547.600	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Perekonomian	Pemeliharaan Kendaraan Perizinan Kendaraan Polis Asuransi	2 Kendaraan 4 Kendaraan 1 Polis	51.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Perekonomian	Pemeliharaan Kendaraan Perizinan Kendaraan Polis Asuransi	1 Kendaraan 4 Kendaraan 1 Polis	34.250.000	
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Biro Perekonomian	Mebelair	25 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Biro Perekonomian	Mebelair	25 Unit	15.000.000	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Perekonomian	AC dan Kipas Angin Komputer, Laptop dan Printer	15 Unit 25 Unit	29.943.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Perekonomian	AC dan Kipas Angin Komputer, Laptop dan Printer	15 Unit 25 Unit	29.943.000	
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen	3 Dokumen	512.855.712	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen	4 Dokumen	395.475.600	
4 01 06 1.01 02	2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen	4 Dokumen	489.720.766	2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen	4 Dokumen	320.876.900	
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					



No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen	4 Dokumen	268.304.257	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen	3 Dokumen	212.635.000	
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	141.795.060	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	99.527.500	
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	128.236.428	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	98.693.600	
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Alam					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Alam					
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Jumlah Perda, Jumlah Pergub	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Pergub	269.277.741	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Jumlah Perda,	1 Dokumen 1 Dokumen	236.733.507	
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	90.785.738	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	62.229.700	



No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	97.264.089	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	98.678.000	



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada forum OPD tidak ada Program/kegiatan yang ditujukan kepada Biro Perekonomian selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 merupakan tahapan transisi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJPD Tahun 2005-2025.

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 disusun dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Ada 10 (sepuluh) fokus yang menjadi program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, yaitu :

1. Pengembangan sistem perekonomian daerah yang berbasis potensi lokal;
2. Meningkatkan efisiensi proses produksi industri (meningkatkan nilai tambah) dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri;
3. Memfasilitasi & membangun networking peningkatan inovasi, teknologi & kapasitas industri;
4. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan mendorong ketersediaan infrastruktur dasar untuk peningkatan penanaman modal, pengembangan industri, dan pengembangan dunia usaha;
5. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah;
6. Meningkatkan upaya intensifikasi pertanian;
7. Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan rakyat melalui intensifikasi, peremajaan, dan rehabilitasi serta peningkatan penggunaan benih bermutu;
8. Mendorong realisasi tanam dan pembangunan unit pengolahan pada perkebunan besar;



9. Pemantapan kawasan hutan dan peningkatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
10. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan);
11. Meningkatkan pelayanan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian

Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis tersebut mengandung pernyataan visi, misi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta target yang diharapkan dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*ultimate outcome*) yang diharapkan.



Tabel. 3.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral							
1	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebunan		7 Kabupaten					
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura		6 Kabupaten					
3	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		7 Kabupaten / Kota					
4	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan		9 Kabupaten / Kota					
5	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat		6 Kabupaten / Kota					
6	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kalimantan Barat		6 Kabupaten / Kota					
7	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		11 kabupaten / Kota					
8	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan		8 Kabupaten					
9	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan		4 Kabupaten					



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral		12 Kabupaten/ Kota					
11	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan		12 Kabupaten / Kota					
2	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah							
1	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		6 Kabupaten / Kota					
2	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum		5 Kabupaten					
3	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat		6 Kabupaten / Kota					
4	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat		5 Kabupaten / Kota					
5	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UMKM, dan Pariwisata		3 Kabupaten					
6	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		5 Kabupaten /Kota					
7	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah		8 Kabupaten / Kota					
8	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal		5 Kabupaten / Kota					
9	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat		7 Kabupaten / Kota					
10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha		1 Perda					



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD							
1	Sinkronisasi Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
2	Monitoring dan Evaluasi BUMD Provinsi Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
3	Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat			50 Orang	50 Orang			50 Orang
4	Penyusunan PERDA Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat			1 Perda	1 Perda			
4	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Ketahanan Pangan							
1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
2	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
4	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
5	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
7	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
8	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
9	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
10	Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
12	Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
13	Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
15	Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
16	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
17	Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
19	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
20	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat			2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen
21	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
5	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha							
1	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum)			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
2	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
3	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
4	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
5	Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag, dan Ekonomi Kreatif			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
7	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
6	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah							
1	Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
2	Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
4	Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
5	Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Dokumen LAKIP		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Dokumen LPPD dan LKPJ 1 Dokumen Monev		



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1 Dokumen TAPKIN		
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Orang PTT 1 Dokumen Laporan Keuangan		
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Dokumen		
10	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah							
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25 Liter Hand Sanitizer 150 Kotak Masker 4 Kotak Penutup Tangan		
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					60 Buku 4.638 Lembar 100 Lembar Materai		
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					33 Dokumen Laporan		
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan		
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Pemeliharaan Kendaraan 4 Perizinan Kendaraan 1 Polis		
2	Pemeliharaan Mebel					25 Unit		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15 Unit AC dan Kipas Angin 25 Unit Komputer, Laptop dan Printer		
13	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					4 Dokumen		
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro					4 Dokumen		
14	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					3 Dokumen		
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					2 Dokumen		
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					2 Dokumen		
15	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan					1 Dokumen 1 Perda		



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha							
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					1 Dokumen		
3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					1 Dokumen		



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Barat
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.965.896.523	APBD			2.162.486.175
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			441.046.716	APBD			485.151.387
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95.655.700				105.221.270
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	6 Dokumen	21.567.400	APBD		1 Dokumen	23.724.140
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Perekonomian	1 Dokumen	11.038.500	APBD		1 Dokumen	12.142.350
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Perekonomian	1 Dokumen LAKIP	15.766.200	APBD		1 Dokumen LAKIP	17.342.820
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	1 Dokumen LPPD & LKPJ 1 Dokumen Monev 1 Dokumen TAPKIN	47.283.600	APBD		1 Dokumen LPPD & LKPJ 1 Dokumen Monev 1 Dokumen TAPKIN	52.011.960
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			87.819.220				96.601.142



Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Perekonomian	2 Orang 1 Dokumen	87.819.220	APBD		2 Orang 1 Dokumen	96.601.142
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.803.600				10.783.960
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Perekonomian	1 Dokumen	9.803.600	APBD		1 Dokumen	10.783.960
4.01.01.1.06	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah			135.027.596				148.530.355
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Perekonomian	25 Liter Hand Sanitizer 150 Kotak Masker 4 Kotak Penutup Tangan	19.750.000	APBD		25 Liter Hand Sanitizer 150 Kotak Masker 4 Kotak Penutup Tangan	21.725.000
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Perekonomian	60 Buku 4638 Lembar 100 Lembar Materai	13.199.400	APBD		60 Buku 4638 Lembar 100 Lembar Materai	14.519.340
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Perekonomian	33 Dokumen Laporan	102.078.196	APBD		33 Dokumen Laporan	112.286.015
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.547.600				36.902.360
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Perekonomian	1 Laporan	33.547.600	APBD		1 Laporan	36.902.360
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.193.000				87.112.300
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Perekonomian	1 Pemeliharaan Kendaraan 4 Perizinan Kendaraan	51.750.000	APBD		2 Kendaraan 4 Kendaraan	37.675.000



Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1 Polis				1 Polis	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Biro Perekonomian	25 Unit	15.000.000	APBD		25 Unit	16.500.000
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Perekonomian	15 Unit AC dan Kipas Angin 25 Unit Komputer, Laptop dan Printer	29.943.000	APBD		15 Unit AC dan Kipas Angin 25 Unit Komputer, Laptop dan Printer	32.937.300
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.524.074.707	APBD			1.676.482.287
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			716.352.500				787.987.750
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		4 Dokumen	395.475.600	APBD		4 Dokumen	435.023.160
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		4 Dokumen	320.876.900	APBD		4 Dokumen	352.964.590
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			410.856.700				451.941.710
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		4 Dokumen	212.635.000	APBD		4 Dokumen	233.898.500
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		2 Dokumen	99.527.500	APBD		2 Dokumen	109.480.250
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		2 Dokumen	98.693.600	APBD		2 Dokumen	108.562.960
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			397.641.207				437.405.327
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan		1 Dokumen 1 Perda	236.733.507	APBD		2 Dokumen 1 Perda	260.406.857



Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha							
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		1 Dokumen	62.229.700	APBD		2 Dokumen	68.452.670
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		1 Dokumen	98.678.000	APBD		2 Dokumen	108.545.800



A. Visi

Visi merupakan suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata kelola Pemerintahan”.

B. Misi

Visi tersebut lebih lanjut dituangkan ke dalam misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip *Good Governance*;
- c. Mewujudkan Kualitas Hidup masyarakat;
- d. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera;
- e. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib;
- f. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

C. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka tujuan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu “Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat”.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang



diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam renstra Biro PEREKONOMIAN Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- 1) Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi;
- 2) Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup;
- 3) Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 4) Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian.

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Biro Perekonomian:

- 1) Peningkatan Sistem Satu Data dan Informasi Terintegrasi untuk Mengembangkan Daya Saing Daerah dan Promosi Potensi Daerah;
- 2) Penguatan Sistem Koordinasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di bidang Lembaga Keuangan Daerah Penguatan Manajemen dan *Capacity Building* SDM BUMD;
- 3) Penguatan Sistem Koordinasi, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kelistrikan, Energi dan Gas;
- 4) Penguatan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat dan Pengamanan Perlindungan Sumber Daya Alam Melalui Rehabilitasi Lahan Kritis serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Hutan Berbasis Masyarakat;
- 5) Peningkatan Sistem Ketersediaan Pangan Melalui Cadangan Pangan, Akses Pangan dan Konsumsi Pangan Berbasis Masyarakat Lokal dan Informasi Teknologi serta Peningkatan *Capacity Building* Para Penyuluh di Bidang Pertanian, Kehutanan Beserta Penguatan Kelembagaannya dengan Mengembangkan Kartu Tani;
- 6) Pengembangan Agrobisnis dan Agro Industri di Bidang Pertanian Sumber Daya Alam, dan Kehutanan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal Sebagai Sumber Daya Perekonomian;
- 7) Peningkatan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Mineral Berbasis Masyarakat;
- 8) Penguatan Kebijakan Struktur Industri Daerah Melalui Peningkatan Pengembangan Industri Yang Mengolah Komoditi Utama Daerah, Peningkatan



- tumbuhnya Industri Peralatan dan Pengembangan Sektor Primer dan IKM Unggulan Provinsi;
- 9) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kelembagaan UMKM Berbasis Teknologi Tepat Guna dan Mengoptimalkan Peran Perbankan terutama Bank Kalbar dalam Rangka Penyaluran Pembiayaan bagi UMKM serta Mendorong Bumdes Untuk Mengembangkan UMKM Maupun Koperasi;
 - 10) Peningkatan Industri dan Investasi Berbasis Kreativitas yang mempunyai unggulan komparatif dan kompetitif;
 - 11) Peningkatan Industri dan Investasi di Bidang Pariwisata berbasis Unggulan Alam dan Budaya Serta Melakukan Promosi Destinasi Wisata melalui Teknologi Informasi;
 - 12) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Layanan Kominfo di Wilayah Pedalaman, Perbatasan dan Pulau Terdepan serta Terluar;
 - 13) Pengembangan Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Berbasis TPID Pedesaan dan Teknologi Informasi.

Strategi Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- 1) Penguatan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan dan BUMD melalui Sistem Terintegrasi yang mendorong Iklim Investasi Yang Kondusif;
- 2) Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kelistrikan, Energi, BBM dan Gas;
- 3) Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Berkelanjutan Berbasis Masyarakat;
- 4) Penguatan Ketersediaan Pangan Strategis Berbasis Daya Lokal dan Kelancaran Distribusi Pangan Berbasis Teknologi Informasi;
- 5) Penguatan Sistem Perekonomian di Bidang Sumber Daya Pertanian, Alam, Mineral dan Kehutanan Yang Berkelanjutan;
- 6) Peningkatan Kinerja Sarana Perekonomian Kerakyatan dan Ekonomi Syariah;
- 7) Penguatan TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota, Percepatan Akses Keuangan Daerah Melalui Bumdes dan Desa berbasis Teknologi Keuangan dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berbasis Teknologi Informasi.



3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Menetapkan Visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah” yang memuat 6 misi pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Maka yang terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah poin ke- 4(empat) “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2022 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat merumuskan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan mengsinkronkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022, maka Biro Perekonomian melaksanakan misi ke- 4.

Dengan memperhatikan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022, maka Biro Perekonomian merumuskan rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 yang terdiri dari 9 Program dan 22 Kegiatan, adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD;
3. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;



- b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan Mebel.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro;
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro;
8. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air;
9. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.456.167.200,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan Program dan Kegiatan yang telah di selaraskan melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian Program dan Kegiatan Renja 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - b. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - f. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;
 - g. Penataan dan Pemeliharaan Arsip.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin;
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor;
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi;
 - e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop;
 - b. Penyusunan Penetapan Kinerja.



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Keuangan;
 - b. Penyusunan LAKIP;
 - c. Penyusunan RENJA SKPD;
 - d. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
 - g. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

5. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
 - a. Penyusunan / Pelaporan Investarisasi Aset;

6. Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD
 - a. Sinkronisasi Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat;
 - b. Monitoring dan Evaluasi BUMD di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat;
 - d. Penyusunan PERDA Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
 - e. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi Kalimantan Barat;
 - f. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan layanan umum daerah;

7. Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Serta Ketahanan Pangan
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat;



- d. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat;
- e. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat;
- f. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat;
- g. Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat;
- h. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat;
- i. Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat;
- j. Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat;
- k. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat;
- l. Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat;
- m. Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat;
- n. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat;
- o. Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan;
- p. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat;
- q. Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat;
- r. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat;
- s. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat;
- t. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat;
- u. Monitoring dan Evaluasi kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat;



8. Program Bina sarana Perekonomian Daerah
 - a. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum);
 - b. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum;
 - c. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat;
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat;
 - e. Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat;

9. Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - a. Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat;
 - b. Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat;
 - d. Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat;
 - e. Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat;



BAB V PENUTUP

Berdasarkan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan melihat permasalahan yang ada di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta tujuan jangka menengah, sasaran dan arah kebijakan/ kegiatan prioritas Biro perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021, maka jumlah total yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2022 berjumlah **Rp. 1.965.896.523,00** yang diimplementasikan kedalam 9 program prioritas dan 22 kegiatan prioritas.

Demikian Renja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini diusulkan semoga dapat menjadi bahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan RAPBD serta khususnya dalam rangka untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.

Pontianak, April 2021
Kepala Biro Perekonomian,

FRANS ZENO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790302 199802 1 001